



IPB

382-146.2

SEM

1

Prosiding Seminar

Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah

Kampus MMA IPB, Bogor
23 Desember 2005

Editor :
Dr. Ir. Hardinsyah, MS
Dr. Asnath M. Fuah, MS

Diselenggarakan Oleh :
Direktorat Kerjasama, WR IV Institut Pertanian Bogor

Bekerjasama dengan :
Kementerian Negara BUMN
PT. Antam, Tbk.
PT. BNI (Persero), Tbk.



RINGKASAN

Dalam pengembangan ekonomi global, perusahaan-perusahaan milik negara perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi pengelolaan dan profesionalisme. Selain itu juga memperhatikan berbagai aspirasi yang saling menguntungkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, Pemerintah Daerah memiliki keinginan untuk ikut serta dalam pengelolaan kepemilikan atau bagian pendapatan dari BUMN yang beroperasi di wilayahnya. Oleh karena itu keberadaan BUMN di daerah memerlukan sosialisasi yang lebih operasional, terutama menyangkut peran, tugas, tanggungjawab, hak dan kewajiban terhadap daerah masing-masing.

Dalam rangka menggalang persepsi yang sama mengenai peranan BUMN dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dan sosialisasi peranan dan kedudukan BUMN tersebut, Kementerian Negara BUMN bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan seminar Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah. Peserta yang hadir pada acara ini berjumlah 110 orang terdiri dari kalangan akademisi baik pengajar maupun mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Jabotabek dan sekitarnya, pelaku bisnis khususnya mitra swasta IPB, masyarakat yang diwakili oleh LSM, perwakilan eksekutif dan legislatif Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor, BUMN dan Instansi Pemerintah lainnya.

Kementerian Negara BUMN sebagai koordinator BUMN mengusahakan sebaik mungkin kebijakan dan pengaturan BUMN serta kontribusinya baik dari segi profit bagi pemerintah daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selaku pemegang saham BUMN pada prinsipnya menerapkan kebijakan korporasi yang lazim berlaku yaitu penentuan pengelolaan atau manajemen perusahaan dan pembagian pendapatan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan skema kepemilikan saham. Dalam pelaksanaan tataran hukum yang berlaku, masih banyak dijumpai persepsi yang berbeda dalam implementasi kebijakan tersebut.

PT. Antam, Tbk sebagai salah satu BUMN mengemukakan konsep *triple bottom-line* meliputi keuntungan, pengembangan masyarakat, dan lingkungan (*profit, people and planet*) dalam hubungannya dengan pengembangan *community development*. Konsep tersebut sejalan dengan konsep yang direkomendasikan oleh IPB, yaitu konsep kemitraan seluruh *stakeholder* dalam kerangka K-economy BUMN, yang menghendaki sinergi antara *stakeholder* dalam lingkup ABCG (*Academic, Business, Community and Government*) berbasis ilmu pengetahuan.

Pemerintah Kabupaten Bogor memaparkan kondisi dan potensi wilayah dalam hubungannya dengan pembangunan daerah dan peluang kemitraan dengan BUMN. Pemerintah Kabupaten Bogor sepakat bahwa konsepsi kemitraan diperlukan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dengan aplikasi kebijakan *good governance*. Kemitraan ini terjalin dengan melibatkan 3 domain pokok yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Bisnis (termasuk BUMN).

Pihak legislatif Kota Bogor menekankan perlunya suatu koordinasi dalam pembangunan agar efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan agar BUMN dapat lebih berperan melalui peningkatan kerjasama dengan Pemda untuk membangun daerah dan masyarakat sekitar, sehingga terjadi pemenuhan kualitas hidup.

Perusahaan-perusahaan pemerintah memerlukan dukungan yang baik dari semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Dukungan tersebut diberikan secara berkesinambungan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing *stakeholder*.

Kadangkala kebijakan atau tataran hukum yang berlaku, menimbulkan persepsi yang berbeda dalam implementasi kebijakan tersebut. Karena itu dengan adanya kebijakan otonomi daerah, kebijakan BUMN dan keberadaan BUMN di daerah, dibutuhkan suatu persepsi yang sama mengenai peranan dan kedudukan BUMN dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah sebaiknya dikembangkan empat prinsip kebijakan pemerintah tentang BUMN, yaitu 1) kewenangan selaku pemegang saham tidak dilimpahkan ke Pemda; 2) *Prinsip on going concern* kelangsungan perusahaan tetap terjamin; 3) Prinsip korporasi dengan Pemda sesuai undang-undang yang berlaku; dan 4) Kontribusi BUMN kepada daerah dialokasikan pada proses akhir melalui dividen.

Guna mengantisipasi masalah yang mungkin muncul diperlukan fungsi yang lebih baik antara BUMN dengan Pemda dan masyarakat sebagai berikut :

1. Dalam proses pembangunan daerah, BUMN dapat berperan serta melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui BUMD guna menumbuhkan antara lain sektor pariwisata, perdagangan dan industri.
2. Bentuk kerjasama : KSO, Perusahaan Patungan (JV);
3. BUMN menawarkan proyek-proyek yang dapat digarap baik oleh investor lokal maupun luar di dalam mengembangkan perusahaan di setiap daerah;
4. Dalam Bidang UKM, Kementerian BUMN telah dan terus menjalin kerjasama dengan Pemda untuk keberhasilan UKM melalui penyaluran hasil Penyisihan Laba BUMN.

PENGANTAR

Kementerian Negara BUMN bekerja sama dengan IPB menyelenggarakan seminar sosialisasi peranan dan kedudukan BUMN dalam kerangka otonomi daerah pada tanggal 23 Desember 2005.

Seminar ini ditujukan untuk : 1) Mensosialisasikan visi peranan dan kedudukan BUMN dalam era otonomi daerah kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait; 2) Mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi-solusi alternatif pemecahan masalah; 3) Mambangun kemitraan yang efektif dan sinergis antara BUMN, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

Seminar ini mendapatkan respon yang cukup baik dari semua *stakeholder* yang hadir. Melalui prosiding ini, respon tersebut diharapkan dapat dikomunikasikan sehingga dapat menjadi masukan bagi semua *stakeholder* dan pembuat kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan BUMN di masa datang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan acara ini yaitu kepada Kementerian Negara BUMN, PT. Antam, Tbk., PT. BNI (Persero), Tbk., PT. Kresna Securities, dan PT. Inter-ad, para pembicara dan pakar, serta semua pihak yang hadir dan menjadi partisipan aktif pada seminar ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia yang telah bekerja sama dengan baik dalam mensukseskan acara ini. Terima kasih kepada Dr. Asnath M. Fuah, MS selaku Wakil Ketua Panitia, Saudari Ani selaku sekretaris dan panitia pelaksana lainnya : Farhah, Tanti, Yuni, Rido dan Ratno. Prosiding ini tidak mungkin terwujud tanpa ketekunan Saudari Sonya dan Merry, oleh karena itu terima kasih atas segala kerja kerasnya.

Bogor, Januari 2006

Ketua Panitia,

Dr. Ir. Hardinsyah, MS

DAFTAR ISI

Ringkasan	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Sambutan Ketua Panitia	vi
Sambutan Rektor IPB	viii
Sambutan Direktur Utama PT. Antam, Tbk.	xi
Sambutan Sekretaris Kementerian Negara BUMN	xiii
1. Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah, <i>Dr. Ir. .Muhammad Said Didu (Sekretaris Kementrian Negara BUMN)</i>	1
2. Masalah dan Solusi yang Dihadapi BUMN Pertambangan di Era Otonomi Daerah, <i>Ir. D. Aditya Sumanagara, Ir. Hari Widjajanto,MM</i> <i>(PT. Antam, Tbk.)</i>	14
3. Kemitraan BUMN, Pemda, Pendidikan Tinggi, dan Masyarakat untuk Kesejahteraan Bangsa dalam Kerangka K-Economy <i>Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.(Wakil Rektor IV IPB)</i>	28
4. Membangun Daya Tarik Investasi Kabupaten Bogor dalam Konsep Kemitraan Tri Pilar, <i>Drs.Rahmat Surjana</i> <i>(Kepala Bagian Perekonomian</i> <i>Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor)</i>	32
5. Optimalisasi Peran BUMN dalam Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, <i>Teguh Rifiananto</i> <i>(Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor)</i>	42
Tanya Jawab	48
Lampiran	60

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jadwal Acara Seminar	60
2.	Daftar Peserta	61
3.	Dokumentasi Kegiatan	71

LAPORAN KETUA PANITIA

Selamat Pagi, Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati :

1. Menteri Negara BUMN dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Ir. Muhammad Said Didu selaku Sekretaris Kementerian Negara BUMN beserta jajaran Pimpinan yang menyertai Sekretaris Kementerian Negara BUMN.
2. Bapak Presiden Direktur PT. Antam, Tbk, Ir. Dedi Aditya Sumanagara beserta jajaran Direktur dan Pimpinan PT. Antam, Tbk.
3. Bapak/ Ibu pimpinan IPB, khususnya Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Senat IPB.
4. Bapak/ Ibu dari berbagai Departemen seperti Depdiknas dan Depsos.
5. Bapak/ Ibu dari berbagai Pemda, khususnya Pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Bapak Teguh Rihananto dari Komisi B DPRD Kota Bogor serta Bapak Drs. Rahmat Surjana selaku Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bogor yang kami undang sebagai pembicara pada seminar ini.
6. Para tokoh LSM dan pakar dari berbagai Perguruan Tinggi mitra IPB serta hadirin yang berbahagia.

Selamat datang di kampus MMA IPB.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya melaporkan bahwa peserta yang berpartisipasi dan telah mengkonfirmasi untuk hadir dalam seminar ini adalah 110 orang dan pada saat ini beberapa orang belum hadir, karena hambatan dalam perjalanan. Sejumlah 60% dari total peserta merupakan mitra IPB terutama di wilayah Jabotabek, dari berbagai Perguruan Tinggi (UNPAK, UNIDA, UIKA, UNB, UIN Jakarta, UMJ, STIE Kesatuan dan IPB), instansi pemerintah dan swasta serta LSM.

Dua bulan lalu Menteri Negara BUMN, melalui stafnya datang ke IPB menyampaikan maksud untuk bekerja sama dengan IPB guna penyelenggaraan seminar ini. IPB menyambut baik dan memberi respon positif untuk bekerjasama menyelenggarakan mengadakan seminar ini. Sedianya seminar ini diselenggarakan bulan lalu tetapi karena pertimbangan suasana puasa, lebaran dan kecocokan waktu pemrasaran sehingga baru terselesaikan pada hari ini.

Sampai kemarin sore, saya merasa khawatir karena memperoleh informasi bahwa Bapak Sekretaris Kementerian BUMN berencana tidak datang karena memiliki agenda dengan Menteri BUMN. Alhamdulillah berkat doa kita bersama, Bapak Dr. Muhammad Said Didu berkenan untuk hadir dalam seminar ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak untuk hadir, memberikan sambutan dan memberikan paparan serta berdiskusi pada seminar ini. Ini juga merupakan kesempatan pertama bagi Bapak Dr. Ir. Muhammad Said Didu berada di IPB, mengunjungi almamater, setelah menjadi Sekretaris Kementerian Negara BUMN.

Harapan dari seminar ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan perundangan yang relatif baru, mengantisipasi penyempurnaan dari undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Disamping itu ada beberapa hal yang akhir-akhir ini muncul di berbagai daerah yang perlu didiskusikan melalui forum

ini terutama tentang bagaimana peran pemda dan masyarakat di daerah/sekitar BUMN dalam pembangunan daerah bersinergi dengan keberadaan BUMN. Diharapkan BUMN tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa melupakan kegiatan bina lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar BUMN. Disamping itu juga diharapkan BUMN dapat mengantisipasi dengan cepat dan tepat kemungkinan masalah potensial dan upaya perbaikannya ke depan, sehingga kemungkinan konflik dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan teima kasih kepada Kementerian Negara BUMN, PT. Antam, Tbk., PT. BNI (Persero), Tbk., PT. Kresna Securities, dan PT. Inter-ad yang turut menyukseskan terselenggaranya seminar ini. Selanjutnya, PT. Antam, Tbk telah berkomitmen menandatangani MoU dengan IPB terutama untuk menggali inovasi-inovasi baru dan sumberdaya manusia berkualitas untuk PT. Antam, Tbk termasuk bagi program pengembangan masyarakat di sekitar tambang PT. Antam, Tbk.

Demikian laporan dari saya, dengan harapan apa yang disampaikan pemrasaran dan hasil diskusi pada seminar ini dapat diambil manfaat dan benang merahnya sebagai masukan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan BUMN di negara kita.

Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Pelaksana,

Dr. Ir. Hardinsyah, MS

SAMBUTAN REKTOR IPB

Yth. Sekretaris Kementerian Negara BUMN beserta staf
Dirut PT. Antam, Tbk beserta staf
Walikota Bogor atau yang mewakili beserta para Kepala Dinas terkait
Para Wakil Rektor, Para Dekan dan Kepala LPPM IPB
Perwakilan dari Perguruan Tinggi di Wilayah Jabotabek
Perwakilan dari BUMN di Wilayah Jabotabek
Perwakilan dari Mitra IPB dan LSM serta Sivitas Akademika IPB

Assalamualaikum Wr. Wb., Selamat Pagi dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan karunia Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara seminar tentang **"Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah"**.

Kami ucapkan selamat datang di salah satu Kampus IPB, yaitu Kampus IPB Gunung Gede. Atas nama IPB, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Menteri Negara BUMN kepada IPB untuk menyelenggarakan kegiatan yang penting ini.

Saudara sekalian yang saya hormati

Seminar ini diselenggarakan dengan tujuan mensosialisasikan visi, peranan dan kedudukan BUMN dalam era otonomi daerah kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait. Selain itu juga untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi-solusi alternatif pemecahan masalah yang timbul, serta bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang efektif dan sinergis antara BUMN, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pengembangan wilayah sesuai potensi masing-masing. Oleh karena itu pada hari ini juga akan ditandatangani Naskah Kesepahaman antara IPB dengan salah satu BUMN, yaitu PT Antam, Tbk.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, dalam perekonomian global dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pembangunan serta memiliki daya saing tinggi yang ditunjukkan dengan efisiensi pengelolaan sumberdaya, dan profesionalisme tinggi yang disertai dengan peningkatan kualitas SDM secara terus-menerus. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan milik negara perlu didukung dan dikoordinasikan dalam suatu wadah.

Mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, pembentukan Kantor Kementerian BUMN merupakan suatu kebijakan yang sangat strategis sebagai wadah untuk memfasilitasi segala program dan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam memenuhi kebutuhan era globalisasi. Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001, bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saudara sekalian yang saya hormati

Otonomi Daerah telah dicanangkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 32/2004 (revisi dari UU Nomor 22/1999) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 35/2004 (revisi UU Nomor 25/1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Seperti kita ketahui program otonomi daerah berdampak nyata terhadap peningkatan semangat otonomi daerah berupa keinginan beberapa Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan kepemilikan atau bagian pendapatan dari BUMN yang beroperasi di wilayahnya.

Berdasarkan UU No. 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah didukung oleh Peraturan Pemerintah salah satunya adalah PP No. 104/2000 tentang Dana Perimbangan menunjukkan bahwa belum adanya perhitungan secara rinci pembagian hasil untuk BUMN di daerah. Hal ini mungkin saja dapat menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan BUMN di daerah. Oleh karenanya, Perguruan Tinggi dalam hal ini IPB merasa perlu untuk menjembatani berbagai aspirasi dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BUMN dalam era otonomi daerah sehingga dapat diperoleh alternatif solusi melalui masukan dari Pemda, LSM, serta pakar dan mahasiswa dari perguruan tinggi.

Saudara sekalian yang saya hormati

Pada hari ini juga akan ditandatangani Naskah Kesepahaman (MoU) antara IPB dan PT Antam, Tbk. Naskah Kesepahaman ini akan menjadi payung kerjasama yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Atas nama IPB, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh PT Antam, Tbk kepada IPB untuk ikut serta mengatasi sebagian masalah yang dihadapi PT Antam, Tbk. Cukup banyak hasil-hasil penelitian IPB yang dapat diterapkan dalam dunia pertambangan, baik terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, reklamasi lahan, dan perbaikan lingkungan di sekitar tambang sehingga dunia pertambangan tidak hanya dikesankan mengambil hasil tambang saja, akan tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

IPB dengan kompetensi yang ada akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Kompetensi yang ada di IPB tidak hanya sebatas bercocok tanam saja, akan tetapi meliputi berbagai kompetensi pada berbagai bidang yang diperlukan dalam pembangunan sektor pertanian dalam arti yang seluas-luasnya.

Pertanian diterjemahkan IPB, tidak saja merupakan kegiatan *on farm* semata, akan tetapi meliputi seluruh kegiatan agribisnis, agroindustri, dan *agroservices* dari kegiatan di hulu sampai hilir baik pada bidang perikanan, peternakan, kehutanan, pertanian dan lingkungannya.

Saat ini IPB telah memiliki SDM yang berkualitas tinggi yang didukung oleh fasilitas akademik yang memadai. IPB memiliki staf pengajar dan peneliti berjumlah sekitar 1375 orang, dimana sekitar 600 diantaranya telah bergelar Doktor dan 590 bergelar Magister. Komposisi SDM tersebut adalah yang terbaik di antara perguruan tinggi lain di Indonesia dan akan menjadi semakin baik dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, *insyaallah* ke depan, IPB akan menjadi mitra strategis bagi PT Antam, Tbk. dan mitra-mitra lain dalam pengembangan industri berbasis pertanian. Mudah-mudahan dengan ditandatanganinya MoU pada hari ini, kerjasama antara IPB dan PT Antam, Tbk. menjadi semakin erat.

Saudara sekalian yang saya hormati

Pada seminar hari ini akan dibahas berbagai hal tentang peran BUMN dalam pembangunan pada era otonomi daerah, yang merupakan bagian dari sosialisasi Kementerian Negara BUMN RI kepada pihak-pihak terkait. Saya yakin dengan kehadiran Saudara sekalian yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perjalanan bangsa ini, maka seminar ini dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi kita semua.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Negara BUMN, PT. Antam, Tbk., PT. BNI 1946 Tbk., PT. Kresna Graha Securities, dan PT. Internusa Surya Mentari yang turut berpartisipasi pada penyelenggaraan seminar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan seminar ini dengan baik.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya buka seminar sehari dengan tema "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah".

Wabillahi taufik wal hidayah
Assalamualaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc

**SAMBUTAN
DIREKTUR UTAMA PT. ANTAM, Tbk.**

Bapak Sekretaris Kementerian Negara BUMN yang saya hormati
Bapak Rektor IPB dan jajaran pimpinan IPB yang saya hormati
Ketua Panitia Penyelenggara yang saya hormati
Para Dosen dan pakar yang saya hormati
Para Wakil dari Pemda Kabupaten dan Kota Bogor yang saya hormati
Serta hadirin sekalian

Assalamualaikum Wr. Wb.

Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak sekalian pada pagi hari ini karena Bogor adalah rumah saya dimana awal karir saya dimulai di Bogor.

Saudara sekalian beberapa menit yang lalu telah ditandatangani MoU PT. Antam, Tbk. dengan IPB terkait pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM). MoU ini merupakan hal penting sekali terutama dalam saat sekarang. PT. Antam, Tbk. merasa bersyukur dapat memiliki kesempatan untuk bermitra dengan IPB.

Perlu saya sampaikan, sekilas mengenai PT. Antam, Tbk. PT. Antam, Tbk adalah salah satu BUMN dibawah koordinasi Kementerian Negara BUMN. Kegiatan PT. Antam, Tbk. terkait dengan multi komoditi seperti nikel, emas, bauksit, dan pasir besi. Dan kegiatannya berada di Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Jawa Barat yang salah satunya adalah tambang emas Pongkor.

Keberhasilan suatu BUMN tidak hanya ditunjukkan oleh *performance profit* atau keuangan, tidak hanya dengan *single bottomline*, tetapi didasarkan atas *triple bottomline (profit, people and planet)*. Jika suatu BUMN hanya mengandalkan dari profit saja maka instansi tersebut tidak akan berumur panjang karena perlu diimbangi dengan kriteria lain yaitu lingkungan dan *community development*. Hal ini sudah menjadi standar dunia dalam mengukur keberhasilan suatu usaha khususnya pertambangan.

Dalam rangka *triple bottomline* perlu dilaksanakan pengembangan masyarakat yang baik. Dalam hal ini terutama di Pongkor karena lokasinya paling dekat, perlu dipilih mitra yang baik, handal dan terpercaya yaitu IPB.

Kemitraan ini sebenarnya sudah berjalan meskipun perlu dimantapkan lagi. Di Pongkor pernah terjadi "gurandil" atau *illegal miners* (penambang tanpa ijin) mencapai jumlah 4000 – 5000 orang. Padahal pekerja tambang hanya sekitar 1000 orang sehingga ketika "gurandil" ada di tambang maka tidak dapat diidentifikasi pekerja tambang yang sebenarnya. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut diambil langkah-langkah menuju *community development*. Tiga hal yang diperlukan adalah keamanan, dukungan pemda dan peningkatan *community development* itu sendiri.

Untuk pemda khususnya Pemda Kabupaten Bogor saya sampaikan terima kasih, karena dengan adanya otonomi daerah yang paling tidak menimbulkan kesulitan dalam

bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Bogor. Hal tersebut kami pahami setelah PT. Aneka Tambang bekerja di 33 kabupaten dengan dengan bermacam-macam karakteristik.

Dalam kaitannya dengan *community development*, kegiatan ekonomi perlu berlanjut walaupun tambang telah selesai. Dalam hal ini, PT. Antam, Tbk. memerlukan kerjasama dengan IPB antara lain untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa berjalan terus setelah tambang selesai. Misalnya pernah dilakukan pertanian dengan penanaman kacang tanah untuk industri Kacang Garuda. PT. Antam, Tbk. juga memerlukan masukan dari IPB dalam pengembangan usaha-usaha lain yang cocok bagi masyarakat sekitar tambang.

Terkait kerjasama dengan IPB dalam bidang SDM, PT. Antam, Tbk sedang mencari kader-kader untuk pengembangan usaha terutama di wilayah Indonesia Timur. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi dengan PT. Antam, Tbk yang tidak bisa lepas dari ahli lingkungan. Ahli lingkungan dari IPB yang sudah ada di Antam merupakan SDM yang cerdas dan penuh integritas. Oleh karena itu PT. Antam, Tbk. bermaksud untuk bekerja sama dengan IPB dalam memperoleh kader-kader terbaik dari IPB untuk bekerja di PT. Antam, Tbk melalui program *fast track*.

Dalam program tersebut calon kader langsung mendapat pendidikan selama 6 – 12 bulan untuk menjadi calon pimpinan PT. Antam, Tbk. di masa datang. Calon kader tersebut memiliki IPK>3 dengan TOEFL>500. Untuk memperoleh kader-kader tersebut kami mendatangi beberapa Perguruan Tinggi antara lain ITB dan IPB.

Demikian sambutan kami, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah apa yang kita kerjakan dapat membawa buah yang baik untuk negara dan bangsa di masa mendatang. Assalamualaikum Wr. Wb.

Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

Ir. Dedi Aditya Sumanagara

SAMBUTAN SEKRETARIS KEMENTERIAN NEGARA BUMN

Assalamualaikum, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Bapak Rektor yang kami hormati
Bapak Para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik dan Jajaran Pimpinan IPB
Dosen dan mitra IPB serta hadirin sekalian yang kami hormati

Kegiatan ini kami rencanakan dengan berbagai perguruan tinggi untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia supaya seluruh *stakeholder* BUMN mengerti posisi BUMN sekarang dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan undang-undang yang terkait. Sehingga kemungkinan fitnah dan masalah dapat diminimalkan diantara *multistakeholder*.

Dalam rencana Kementerian Negara BUMN pada tanggal 1 Januari 2006 seluruh landasan sistem pengembangan BUMN ke depan sudah dapat diselesaikan. Kerjasama BUMN dengan Perguruan Tinggi diharapkan dapat ditingkatkan untuk regenerasi bibit-bibit BUMN. Jika Kementerian Negara membawahi 1000 perusahaan dan tiap perusahaan memerlukan direksi dan komisaris masing-masing 5 orang maka diperlukan 5.000 -10.000 orang untuk ditempatkan di BUMN. Jika masing-masing posisi diambil dari 3-5 calon, maka dibutuhkan 15.000 -25.000 orang calon untuk diseleksi.

Direncanakan akan ada standar pendidikan untuk jabatan tertentu di BUMN. Misalnya di PTP, untuk menjadi administratur di PTP diperlukan standar pendidikan tertentu. Posisi seseorang tidak ditentukan karena faktor-faktor seperti kedekatan dengan seseorang yang mempunyai kekuatan, dan unsur politis lainnya. Agar dapat meminimalisir intervensi dalam penempatan jabatan diperlukan bantuan perguruan tinggi dalam menata sistem. Landasan undang-undang dengan sistem yang baik sangat diperlukan.

Kami mohon agar IPB dapat membantu dalam menemukan orang-orang terbaik untuk duduk dalam pemilihan calon pimpinan BUMN, sebagai direksi pada 52 BUMN dibawah koordinasi Kementerian Negara BUMN, dalam proses seleksi seringkali terjadi komunikasi diluar kegiatan yang mengandung unsur politis. Jika masing-masing diperlukan 10 orang direksi dan pimpinan yang diseleksi dari 3 orang calon maka terdapat sekitar 1600 orang dalam proses seleksi yang masing-masing memiliki "sponsor".

Dalam Kementerian Negara BUMN segala hal perlu diputuskan dengan cepat dimana 99% keputusan merupakan eksekusi dan 1% adalah waktu untuk berfikir. Karena jika suatu hal terlambat diputuskan akan menimbulkan masalah di BUMN. Hal ini juga disebabkan oleh rumitnya aturan pemerintah.

Kami juga mohon bantuan pemikiran karena belakangan ini muncul dua pemikiran. Ada dikotomi yang berpendapat sebaiknya BUMN dikembalikan ke sektor masing-masing, yang artinya mengembalikan ke sistem lama. Di lain sisi, kurang baiknya pengelolaan BUMN adalah karena regulator dan operator berada dalam satu pintu.

Saya ucapkan terima kasih dan selamat atas kerjasama yang ditandatangani pagi ini antara IPB dengan PT. Antam, Tbk. Kami harapkan dengan kerjasama tersebut program-program seperti reklamasi tambang dan pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat sekitar tambang dapat berjalan dengan baik. Tidak terjadi dampak negatif bagi masyarakat sekitar tambang setelah kegiatan di tambang selesai.

Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan dalam kata-kata saya. Terima kasih, selamat mengikuti seminar.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN,

Dr. Ir. Muhammad Said Didu

SESI TANYA JAWAB

TANYA JAWAB

Tanya jawab sesi 1

1. Nama : Rafa Adi Galuh Agung
Instansi : Litbang PDAM Tirta Pakuan Bogor
- Pertanyaan/ : Dalam menghadapi era globalisasi dan AFTA, PT. Antam yang
Tanggapan : merupakan perusahaan/BUMN kebanggaan di Indonesia.
1. Dilihat dari grafik pertumbuhan pertambangan yang dikelola, komitmen apa yang diperlukan sehingga Indonesia siap menghadapi Ekonomi global?
 2. Bentuk kemitraan apa yang mungkin dikembangkan oleh PT. Antam, seperti bentuk UKM dan kerjasama dengan atau perusahaan tertentu, khususnya untuk pengembangan di Pongkor?
- Jawaban : Pertambangan, khususnya PT. Antam memberikan peningkatan kontribusi terhadap GDP secara langsung sebesar 3,5%. Porsinya dapat ditingkatkan lagi jika permasalahan-permasalahan yang muncul dapat dihindari. Usaha-usaha yang dilakukan PT. Antam dalam menghadapi persaingan global adalah dengan meningkatkan kapasitas perusahaan. Hal ini dilakukan dengan melakukan investasi komoditi feronickel sebesar 320 juta USD yang akan mulai beroperasi mulai kuartal pertama 2006. PT. Antam juga melakukan *joint venture* di daerah Kalimantan Barat mulai tahun 2007, komoditi alumina sebesar 220 juta USD. Dalam *longterm* juga direncanakan akan ada investasi dalam bentuk *joint venture* senilai 1 milyar USD. Akan tetapi sebelumnya perlu melakukan perbaikan dari segi operasi dan sistem. Dalam hubungannya dengan UKM, ada kontribusi dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program kemitraan diambil dari 1-3% keuntungan. Sedangkan Bina lingkungan bersifat investasi dana bergulir. Sehingga

dilakukan *monitoring* pengembalian dana untuk diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Hingga saat ini pengembalian masih sekitar 50%. Dana tersebut diberikan melalui ajuan suatu proposal. Kegiatan ini diterapkan di seluruh Indonesia termasuk di Pongkor.

2. Nama : Feri
Instansi : BEM FKH IPB
Pertanyaan : Apakah yang sudah dan akan dilakukan PT. Antam dalam menghadapi persoalan adanya euforia otonomi daerah berkaitan dengan permasalahan yang timbul di daerah?
Jawaban : Otonomi daerah sudah berjalan dan didukung dengan Undang-Undang yang perlu koordinasi setiap *stakeholder* dengan baik, kebijakan tersebut yaitu UU No. 32 tahun 2004. Koordinasi antar *stakeholder* diperlukan untuk menghindari dominasi yang terlalu kuat di daerah. Dengan adanya peraturan tersebut juga perlu pemantapan fungsi pusat, provinsi dan kota/kabupaten untuk mengharmonisasikan dan lebih mengoptimalkan keberhasilan otonomi daerah.
- Peran pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang secara langsung misalnya dengan membantu pengembangan SDM. Kewenangan pertambangan sebesar 90% seluruhnya ditransfer ke daerah, hal ini disebabkan karena di pusat sudah tidak ada Dirjen Pertambangan. Dalam mengembangkan SDM, PT. Antam membantu beberapa daerah dengan sistem informasi geografi.
- Dalam aspek *business to business*, BUMN tidak mungkin membantu pemda secara keseluruhan. Untuk peningkatan kemampuan SDM, PT. Antam mengadakan dialog dengan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten. Dari diaog tersebut, dapat diketahui bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada figur kepemimpinannya.

3. Nama : Rheena Effendi
- Instansi : Universitas Islam Djuanda, Bogor
- Pertanyaan : 1. Bagaimana tanggapan PT. Antam mengenai PDAS provinsi dengan kabupaten, serta bagaimana kontribusi serta distribusi pembagiannya?
2. Bagaimana PT. Antam menyikapi adanya masyarakat Kabupaten Bogor yang kelaparan dari Nanggung yang menjadi berita nasional?
3. Bagaimana pandangan PT. Antam mengenai tumpang tindih hak pengelolaan daerah hutan dan tambang?
- Jawaban : Sudah ada aturan mengenai pembagian porsi antara provinsi dan kota/kabupaten. Pada instansi swasta, 30% keuntungan disalurkan melalui *corporate tax* ke pusat. Kemudian dana tersebut didistribusikan ke daerah untuk dana perimbangan. Sedangkan penarikan pajak, pungutan dan iuran lain dilakukan dari pusat. Royalti ditentukan oleh komoditi, penjualan, dan lain-lain. Pembagiannya dengan komposisi 34% untuk pusat dan 66% untuk daerah. Dari 66% tersebut diambil 30% untuk provinsi dan sisanya diberikan ke kabupaten. Adapun pemasukan-pemasukan ke daerah seperti PBB, Pembangunan jalan, air tanah dsb akan tetapi dengan cara tersebut banyak daerah yang masih mengalami kekurangan dana.
- Kelaparan di Pongkor, akan segera dicek dan akan segera diatasi PT. Antam. PT. Antam akan senantiasa mengatasi masalah yang mungkin timbul di daerah sekitar tambang. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya dana sejumlah total Rp. 6 milyar untuk *community development*.
- Dalam UU No. 41/1999 telah jelas bahwa wilayah hutan lindung dan taman nasional tidak boleh dieksplorasi untuk daerah tambang. Akan tetapi di beberapa daerah, suatu wilayah ditentukan menjadi taman nasional atau hutan

lindung pada saat sedang ada kegiatan operasi pertambangan. Maka untuk ke depan, daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk operasi tambang.

4. Nama : Kasno
Instansi : Fakultas Kehutanan IPB
Pertanyaan : Di daerah konsesi pasca tambang rehabilitasi merupakan wewenang perusahaan tambang. Jika ditemukan nilai tambah pada daerah tersebut, siapa yang memiliki wewenang atas nilai tambah, apakah perusahaan tambang atau pemda?
Jawaban : Kegiatan pasca tambang masuk ke dalam ketentuan-ketentuan dalam *balance sheet*, pada tingkat liabilitas yang disyaratkan, perlu segera dilakukan reboisasi dan rehabilitasi. PT. Antam memasukan dana sebesar Rp. 15 milyar. Di negara lain, pasca tambang sudah diaplikasikan untuk daerah wisata dan mempunyai nilai untuk dikembangkan ke masyarakat. Kegiatan pasca tambang PT. Antam dikelola oleh Yayasan Antam sebagai bentuk kelanjutan kehadiran tambang.
5. Nama : Maidaswar
Instansi : Forum Pascasarjana IPB
Pertanyaan : 1. Sejauh mana *community development* yang telah dilakukan PT. Antam sebagai model BUMN, menyentuh masyarakat dan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang?
2. Dalam tingkat musyawarah BUMN, sejauh mana konsep *community development* dihimbau oleh pemerintah untuk diaplikasikan dalam hubungannya dengan privatisasi? Misalnya dengan adanya danau yang ditinggalkan PT. Timah di pulau Bangka siapa yang bertanggung jawab?
3. Sebagian besar BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat

pertanian, IPB sebagai institusi pertanian tentu memiliki terobosan-terobosan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauh mana IPB menyiapkan program-program teknologi terapan yang langsung bisa diserap masyarakat dan dapat langsung diaplikasikan?

Jawaban : Privatisasi perlu dilakukan dengan hati-hati oleh Menteri Negara BUMN. Esensinya, hanya dilakukan pada kasus khusus dan merupakan hasil evaluasi yang tepat serta banyak didukung oleh *rights issue* untuk pengembangan usaha, dan bukan merupakan divestasi uang untuk pemerintah. Karena jika persentase pemerintah diturunkan maka ada nilai yang lebih tinggi karena ada sejumlah uang yang dapat dikembangkan perusahaan. Privatisasi perlu didukung jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan bukan untuk sekedar menambal anggaran serta akan menambah masalah di kemudian hari.

Dalam hubungannya dengan program-program pembangunan, IPB sudah terlibat dalam bagaimana usaha-usaha dalam meningkatkan profit dan menurunkan kerugian yang tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga dalam bentuk *intangible profit*. Saat ini Indonesia sedang berada dalam masa krisis, yang dalam bidang keilmuan disebut masa anomali. Dimana tidak adanya otoriter dari *scientist*. Perguruan Tinggi tidak mempunyai wewenang dan kalah oleh adanya LSM.

Perguruan tinggi berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun Perguruan Tinggi tidak melakukan amdal secara langsung tetapi tetap melakukannya secara ilmu pengetahuan, dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, analisa laboratorium mengenai kadar logam berbahaya, dsb. Saat ini perguruan tinggi masih berada dalam konteks *low*

enforcement sehingga peran perguruan tinggi seperti tidak ada. Dalam hal ini perlu digerakkan kembali konsep BUMN yang mempunyai *social* responsibilitas dengan kampus yang masuk ke dalam konsep tersebut.

IPB dengan PT. Antam akan mengembangkan suatu bentuk *community development* yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup melalui remediasi dan reboisasi. Bentuknya antara lain dengan penanaman pangan dan non pangan serta penanaman pohon BBM, atau pohon jarak. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat mendatangkan *multi benefit* karena dapat memberikan alternatif *non renewable resources* dan untuk produksi listrik.

Pengembangan komunitas sekitar tambang dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan, baik secara langsung melalui beasiswa, maupun secara tidak langsung melalui *short course*.

Pengembangan *Good Corporate Governance* merupakan alat bantu dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, *fairness*, dan pelayanan publik. Akan tetapi perlu penyeragaman pemahaman tentang *good corporate governance* dan peran masing-masing *stakeholder* terkait.

6. Nama : Ridwan Nasabuda
Instansi : Forum Wacana IPB
- Pertanyaan : 1. Dalam pengembangan BUMN khususnya di bidang pertambangan, selain profit perlu diperhatikan hal-hal seperti lingkungan dan *community development*. PT. Antam sebagai BUMN perlu menghindari kejadian seperti trauma di Sulawesi Utara yang berkaitan dengan PT. Newmont. Dalam rangka hal tersebut, kerjasama apa yang sudah dilakukan dengan Pemerintah dan LSM lokal?
2. IPB memiliki jalur BUD bagi pengembangan masyarakat di

daerah. Untuk peningkatan SDM, apakah sebagian dana pengembangan community development sebesar 1-3% yang ada di PT. Antam dapat diarahkan pada pembiayaan mahasiswa tersebut?

Jawaban : Masalah lingkungan dan isu-isu lingkungan serta konsep triplebottomline tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan isu global. Newmont merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan pada negara-negara tersebut masalah-masalah lingkungan secara umum dapat diatasi dengan baik karena adanya sistem hukum dan pengawasan yang benar dan kuat.

Dalam beberapa kasus di Indonesia isu lingkungan seringkali berubah menjadi isu politik yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan kelompok. Sehingga suatu masalah lingkungan perlu dilihat secara waspada. Dalam sistem yang kurang mantap, isu-isu yang sensitif bisa berkembang menurut kepentingan kelompok tertentu. Yang kontra maupun pro terhadap kepentingan umum. Sehingga diperlukan sistem yang baik dan bisa menjangkau mana yang benar dan salah.

Kontrol lingkungan yang berlaku di PT. Antam diantaranya amdal dan proper test. Dalam proper test PT. Antam pernah mengalami ketidakadilan yang disebabkan masalah lingkungan yang sensitif, karena kasus serupa pernah terjadi di Jepang dan tidak menjadi masalah.

Dalam peningkatan SDM, ditentukan beberapa kriteria dan aturan yang dituangkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL). Antam selalu mendukung bentuk-bentuk pengembangan SDM yang bisa dikembangkan di masyarakat dalam koridor aturan yang ada, hal ini bisa berupa kursus-kursus dan beasiswa.

Tanya jawab sesi 2

1. Nama : Anwar Abas
Instansi : Universitas Islam Negeri
Pertanyaan/ tanggapan : 1. Ada ketegangan antara pembangunan yang berlangsung dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Sebagai contoh, tanah masyarakat dibebaskan oleh Perum Angkasa Pura. Masyarakat melihat pembangunan sudah berjalan dan Perum Angkasa Pura mendapatkan keuntungan. Akan tetapi setelah itu masyarakat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Masyarakat mengeluh ingin mendapatkan bagian. Dapatkah digagas dari Perguruan Tinggi melalui proses legislasi, agar pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan perusahaan yang berskala besar (BUMN/BUMD) tidak sepenuhnya dibangun atas dasar jual beli, tetapi harus ada bagian yang memasukkan dimensi bagi hasil, sehingga ketika usaha berjalan, ada yang diperoleh masyarakat secara cash maupun kontinuitas.
2. Beberapa daerah (contohnya Aceh dan Riau) bermaksud memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Hal itu wajar, karena ada ketidakadilan. Kekayaan daerah disedot ke pusat, tetapi tidak diteteskan ke daerah. Untuk masa datang, sebaiknya dibuat model *community development*.
- Jawaban : Tidak semua masalah pertambangan diberikan ke daerah Kabupaten dan Kota, tetapi yang diberikan hanya golongan C seperti pasir, semen, dan batu. Sedangkan golongan A dan B (emas, minyak) masih di pusat. Masalah bagi hasil merupakan kewenangan pusat. Jadi, ada keterbatasan-keterbatasan otonomi.

2. Nama : Muhammad Hudori
Instansi : Universitas Djuanda
Pertanyaan/ tanggapan : Jika berbicara mengenai otonomi daerah, kita berbicara mengenai sentralisasi ke desentralisasi. Jiwa dari otonomi daerah adalah prinsip *bottom-up*, di mana suatu kebijakan dari atas harus memperhatikan kepentingan masyarakat bawah. Bila dikaitkan dengan ekonomi, langkah konkret apa dari eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di wilayah kota/kabupaten dalam menerima investor, baik asing maupun dalam negeri (PMDN)?
Jawaban : Perizinan menyangkut regulator, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Bogor adalah bagaimana supaya investor lebih banyak masuk ke Bogor dengan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu pada tahun 2004 kami membuat Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMO) yang akan mengkoordinir semua kepentingan investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Bogor.
3. Nama : Jono
Instansi :
Pertanyaan/ tanggapan : Saya ingin menambahkan harapan dan mudah-mudahan pertanyaan saya menjadi prioritas program di Bogor karena ini merupakan masalah banyak orang di sini, yaitu kaitan kerjasama BUMN dengan Pemda (kaitannya dengan SDM).
1. Terjadi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh angkot, meskipun sudah ada upaya untuk menanggulangnya. Mengapa ini terjadi? Ini terkait dengan SDM, karena mungkin angkot tidak diatur, polisi tidak mengatur dengan serius. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program yang utama, sementara SDM tidak diperhatikan. Saya ingin hal tersebut menjadi prioritas. Barangkali bukan

hanya jiwa entrepreneurship yang ditingkatkan, tetapi juga servisnya.

2. Kerjasama antara Pemda Kota dan Pemda Kabupaten kurang sinkron. Contohnya, pembuatan terminal yang letaknya berdekatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Padahal kalau dengan kemitraan, bisa dibuat satu terminal saja, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan persentase. Bagaimana tentang masalah-masalah ini?

Jawaban : Mengenai sinkronisasi, diharapkan hal tersebut dapat dimulai dari pertemuan ini. Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam berbagai hal.

4. Nama : Ari wuisang
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Pertanyaan/ tanggapan : Saya ingin menambahkan untuk Bapak Teguh dalam paparannya mengenai TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 yang tidak dituangkan dalam UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Sebagaimana dipahami, TAP bersangkutan sejak tahun 2003 melalui sidang tahunan MPR tahun 2003 statusnya sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Lebih jauh lagi, dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR sudah terhapus dari Tata Urutan Aturan Perundang-undangan. Dengan demikian, MPR ke depannya sudah sudah tidak bisa lagi menerbitkan ketetapan yang sifatnya mengatur. Jadi, bukanlah hal yang aneh apabila amanat TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 tidak dituangkan ke dalam UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 karena memang TAP tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2003.

Jawaban : TAP MPR dimasukkan bukan sebagai acuan, melainkan hanya untuk mengkonfrontir dengan *masterplan* BUMN. Walaupun secara yuridis sudah tidak ada, tetapi secara substansi TAP MPR

itu seharusnya menjadi sebuah ruh bagi kebijakan otonomi daerah itu sendiri.

5. Nama : Edas
Instansi : MMA IPB
Pertanyaan/ tanggapan : 1. Bapak Dedi (PT Antam) mencatat bahwa ada keraguan BUMN dan rakyat untuk menitipkan dana *community development* melalui Pemda. Bagaimana pendapat Bapak Rahmat selaku eksekutif (Pemda) mengenai hal tersebut?
2. Terkait dengan otonomi daerah, ada beberapa hal mengenai perizinan BUMN dapat berinvestasi di daerah yang diturunkan ke daerah dari pusat. Bagaimana regulasi di Kabupaten Bogor?
3. Selama ini pembangunan dilakukan dengan orientasi proyek. Tidak ada sinkronisasi dalam pelaksanaannya. Sejauh mana reformasi ini diatur oleh DPRD atau disarankan kepada eksekutif kita agar selalu dilakukan sinkronisasi pembangunan (PDAM, instalasi jalan, instalasi listrik bawah tanah, gas) karena semua itu mengganggu kenyamanan pengguna jalan?
- Jawaban : 1. Panitia anggaran tidak pernah mengusulkan ada *community development* masuk dana APBD.
2. Perizinan menyangkut regulator, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Bogor adalah bagaimana supaya investor lebih banyak masuk ke Bogor dengan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu pada tahun 2004 kami membuat Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMDD) yang akan mengkoordinir semua kepentingan investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Bogor.
3. Mengenai sinkronisasi, diharapkan hal tersebut dapat dimulai dari pertemuan ini. Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam berbagai hal.

6. Nama : Hj. Tini Suhartini
Instansi : Universitas Djuanda
Pertanyaan/ saran : 1. Saya ingin informasi dari Bapak Teguh berkenaan dengan pembangunan Kota Bogor. Dijelaskan bahwa Pemda mengalami kesulitan dana, padahal ada perkembangan yang sangat pesat dalam hal pembangunan mall di Kota Bogor. Di DKI Jakarta, PAD sebagian besar dihasilkan dari mall (dengan menentukan tarif parkir per jam). Jika mengalami kesulitan dana, kenapa Pemda Kota Bogor tidak menentukan tarif parkir per jam di mall sebagaimana yang dilakukan DKI Jakarta?
2. Kenapa setiap ada perbaikan jalan dsb. tidak ada koordinasi? Jika terus-menerus seperti itu dana akan terbuang percuma (mubazir). Mohon masukan Bapak Teguh agar hal itu tidak terjadi terus menerus.
- Jawaban : 1. Mall merupakan masalah yang sudah ada sejak dulu. Dewan ingin menyampaikannya, tetapi tidak bisa terlibat langsung dalam perizinan karena hal tersebut merupakan kewenangan eksekutif. Namun, sudah dibuat Perda tentang penyelenggaraan pasar yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
2. Koordinasi (kerjasama) antar daerah belum optimal karena masih ada arogansi daerah. Mudah-mudahan masalah ini segera selesai, dan ini merupakan PR untuk Pemda Kabupaten dan Kota.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Acara Seminar

JADWAL ACARA
Seminar
SOSIALISASI PERANAN DAN KEDUDUKAN BUMN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Bogor, 23 Desember 2005

Jam	Kegiatan	Presenter (Moderator)
08.00 – 08.45	Registrasi Peserta	Panitia
08.45 – 08.47	Pembukaan	PIC: MC
08.47 – 08.50	Laporan Panitia	Dr. Hardinsyah, MS
08.50 – 08.55	Penandatanganan MoU antara IPB dan PT. Antam, Tbk dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata oleh Rektor IPB dan Direktur Utama PT. Antam, Tbk. (Disaksikan oleh Sekretaris Menteri Negara BUMN)	PIC: MC dan Protokoler
08.55 – 09.10	Sambutan	Rektor IPB (Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc)
09.10 – 09.15	Sambutan	Direktur Utama PT. Antam, Tbk Ir. Dedi Aditya Sumanagara
09.15 – 09.30	Sambutan	Sekretaris Kementerian Negara BUMN Dr. Ir. Muhammad Said Didu
09.30 – 10.30	Sesi 1: Peranan, kedudukan dan kebijakan BUMN di era Otonomi Daerah	Sekretaris Kantor Kementerian BUMN (Dr. Ir. Muhammad Said Didu) Moderator : Prof. Dr Ir. Sjafrri Mangkuprawira
10.30 – 11.00	Break	
11.00 – 11.30	Sesi 2: 1. Masalah dan solusi yang dihadapi BUMN di era Otonomi Daerah	Direktur Utama PT Antam, Tbk. (Ir. Dedi Aditya Sumanagara)
11.30 – 11.45	2. Kemitraan BUMN dengan Pemda dan Pendidikan Tinggi bagi kesejahteraan masyarakat	Wakil Rektor IV IPB (Dr. Asep Saefuddin, M.Sc)
11.45 – 13.15	Sholat Jumat dan Makan siang	
13.15 – 14.00	Diskusi	Moderator : Dr. Ir. Hardinsyah, MS
14.00 – 14.15	Sesi 3 1. Peranan dan harapan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengembangan BUMN di daerah	1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Drs. Rahmat Surjana)
14.15 – 14.40	2. Peranan dan harapan Pemda Kota Bogor dalam pengembangan BUMN di daerah	2. Sekretaris Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kota Bogor (Teguh Rihananto)
14.40 – 15.10	Diskusi umum & perumusan	Moderator : Dr. Ir. Hardinsyah, MS
15.10 – 15.20	Penutupan	Wakil Rektor IV IPB Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

SEMINAR SEHARI
 "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah"
 Bogor, 23 Desember 2005

No.	Nama Lengkap (untuk sertifikat)	Instansi	Alamat Lengkap (untuk pengiriman sertifikat)	Telp/HP
1	Syahrul A'dam, M.Ag	Fakultas Syariah & Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		
2	Agus Satory, SH	Fakultas Hukum Univ. Pakuan Bogor	Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor	0251-373588
3	Andreas Tanadjaya	PT Kresna Graha Sekurindo		
4	Anwar Abbas, H, Drs, MM, M.Ag	Fakultas Syariah & Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		
5	Ari Wuisang, SH	Fakultas Hukum Univ. Pakuan Bogor	Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor	0251-373588
6	Dinalara D.W.B.B., SH	Fakultas Hukum Univ. Pakuan Bogor	Jalan Pakuan PO BOX 452 Bogor	0251-373588
7	Dwi Gemina, SE, M.Si	Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245155
8	Elyas, Ir	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	PO Box 1080, Pekanbaru- Riau	08127574508
9	Euis Amalia, M.Ag	Fakultas Syariah & Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		
10	Guntur Kuntjoro, Dr., M.Si	PT. Antam Tbk., Pongkor		081514104343
11	H. Rheena Effendhy, SH., MM., MBA., MH	Fakultas Hukum Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245107, 08128343568
12	Hafizd Hamzah	HMI Cabang Bogor	GSMI Batu Hulung	0251-628090
13	Hambra	K-BUMN		

14	Hari Sulistiono, Drs., M.M	Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Bangsa	Jl. Baru Km. 4, Cimanggu-Bogor	08121888245
15	Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H	Fakultas Hukum Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245107
16	Indra Cahya Kusuma, S.E	Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245155
17	Iriyadi, Drs., Ak,, M.Comm	STIE Kesatuan	Jalan Ranggagading No. 1 Bogor	0251-337733, 358787
18	Ismail Fahmi Tuasikal, SH., MH	PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	Jalan Siliwangi No. 121 Bogor	Telp/Fax. 0251-324111, 321575
19	Jan Horas Veryady Purba, Ir., M.Si	STIE Kesatuan	Jalan Ranggagading No. 1 Bogor	Telp/Fax. 0251-337733, 358787
20	Kurniawan	K-BUMN		
21	La Ode Rusyamin, A.Md	SAJOGYO INSIDE	Jalan Malabar 22 Bogor	0251-374048
22	Luthfi Mahmudania Kahfi	Kohati HMI Cabang Bogor	Wisma Balebak Padasuka	08159917541
23	M. Azis Firdaus, SE	Fakultas Ekonomi UIKA Bogor	Jalan KH Sholeh Iskandar KM 2 Bogor	0251-357804
24	Edy Safni Rosa	BNI	Jl. Ir. Djuanda No. 51	323266
25	M. Setiadi Wibowo	BNI	Jl. Ir. Djuanda No. 52	323267
26	Mardiansyah, SP	DPD KNPI Kab. Bogor	Jalan Raya Semplak No.28 Cemplang Baru Bogor	0251-623775, 081514107313
27	Mulyadi, SH	Fakultas Hukum Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245107
28	Nazarudin, Drs., MM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor	Jalan Dadali No. 4 Bogor	0251-326661
29	Nursamsiah Asharini	Ditjen PKPPM-Ditjen Dikti	Wisma Aldiron Dirgantara Jl. Gatot Subroto	021-79188070
30	Pram Purnama Alam	BRI Cabang Bogor	Jalan Dewi Sartika No. 6 Bogor	0251-313137

31	R. Hildawati, Dra., MM	Bawasda Kota Bogor	Jalan Pahlawan Blk No. 144	0251-313274, Fax. 0251-373229
32	Rafa Adi Galuh Agung , SE, MM	PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	Jalan Siliwangi No. 121 Bogor	Telp/Fax. 0251-324111, 321575
33	Restuning Dyah Widyanti, SE	SAJOGYO INSIDE	Jalan Malabar 22 Bogor	0251-374048
34	Sarwat Fardaniyah, Dra	Departemen Sosial		
35	Sudarijati, SE, M.Si	Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda	Jalan Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Bogor	0251-245155
36	Suyatno, Drs	FISIP Univ. Muhammadiyah Jakarta	Jalan KH Ahmad Dahlan Cirendeup Ciputat Jakarta	021-744568, 7423273, Fax.
37	Syahrir Ika, Ir., MM	PT. Antam Tbk.	Jalan TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan	021-7891234, Fax. 7891219
38	Tina Naryantini, Dra	BAPPEDA Kab. Bogor	Jalan Segar III Kav 2 Komplek Perkantoran	021-87906240, Fax.
39	Uzer Dzulfiqor	BAWASDA Kab. Bogor	Jalan Indah No. 1 Cibinong	021-8756565
40	Wartoyo Hadi, Drs., MM	Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Bangsa		
41	Wawan Darwan, SP., MM	Dinas Agribisnis Kota Bogor	Jalan Raya Cipaku No. 5 Bogor	0251-318670
42	Yudiana, SE, MM	Fakultas Ekonomi UIKA Bogor	Jalan KH Sholeh Iskandar KM 2 Bogor	0251-357804
43	Hari Widjajanto	PT. Antam, Tbk	Jl. Pemuda No. 1 Pulogadung Jakarta	021-4755380
44	Machmud			08159639477
45	Agung G.	Pemkab Bogor		08567621359
46	Agus	Metro Pagi		
47	Alan	NRI	Sempur	

48	Deasy	PT. Antam, Tbk		
49	Ibrahim S, SH	PT. Antam, Tbk		
50	Muhamad Hudory, SH	Fak. Hukum UNIDA	Jl. Tol Ciawi No. 7 Bogor	081511547970
51	Herlyn, Dra	Bappeda Kota Bogor	Jl. Kapten Muslihat No. 21	338052
52	Dadang Komarudin	Bappeda Kota Bogor	Jl. Kapten Muslihat No. 21	338052
53	Eri Krisna	FISIP UNIDA	Jl. Tol Ciawi No. 7 Bogor	244773

SEMINAR SEHARI
 "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah"
 Bogor, 23 Desember 2005

No.	Nama Lengkap (untuk sertifikat)	Instansi	Telp/HP
54	Cece Sumantri, Dr., Ir., M.Agr.Sc	Departemen IPTP Fapet IPB	
55	Edy Djauhari, Drs., Msi	Pusat Studi Biofarmaka	
56	Jono M. Munandar, Ph.D	Departemen Manajemen FEM IPB	
57	Kasno, Ir., M.Sc	Fahatan IPB	
58	Ma'mun Sarma, Dr., Ir., MS	Kantor PI	
59	Muhamad Firdaus, SP., M.Si	Pusat Kajian Buah-buahan Tropika (PKBT)	
60	Nunung Kusnadi, Dr., Ir., MS	Departemen Agribisnis FEM IPB	
61	Nunung Nuryartono, Dr., Ir., Msi	Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB	
62	Parulian Hutagaol, Dr	PPLH IPB	
63	Pudji Muljono, Dr., Ir	Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)	
64	R. P. Agus Lelana, drh., Sp.MP, M.Si	Kantor Prohumasi	
65	Rahmi Purnomowati, M.Si	Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)	
66	Yusuf Sudo Hadi, Prof., Dr., Ir., M.Agr	Wakil Rektor III IPB	
67	Ujang Sumarwan, Prof., Dr., Ir., MSc	MMA-IPB	0251-313813
68	Agus Purwito	IPB	
69	Erliza Hambali	SBRC-IPB	
70	A.Faroby F	ESL-FEM	081310278663
71	Adi Hadianto	ESL-FEM	08176477463
72	Ali Yansyah A	Departemen Manajemen FEM IPB	08567300500

73	Masduki	Departemen Manajemen FEM IPB	
74	Lusi Fausia	PSPs-IPB Baranangsiang	08121108006
75	Niken	Prohumasi	08151612264
76	Wahyu Darsono	P2SDM Baranangsiang	0811110192
77	Busaid	P2SDM Baranangsiang	0811119680

SEMINAR SEHARI
 "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah"
 Bogor, 23 Desember 2005

No.	Nama Lengkap (untuk sertifikat)	Instansi	Alamat Lengkap (untuk pengiriman sertifikat)	Telp/HP
78	Ahmad Nur	BEM FKH IPB	Jalan Agatis Kampus FKH IPB Darmaga	08158427849
79	Ai Nurhayati	Sekolah Pascasarjana IPB		
80	Dwi Kusuma Purnamasari	Sekolah Pascasarjana IPB	Puri Hapsara 2D, Darmaga	081803635505
81	Eko Budi Prayogi	Centre of Management (COM@)	Wing Rektorat Lantai 2 Kampus FEM Darmaga	08561785425
82	Eli Sahara	Sekolah Pascasarjana IPB		
83	Evawany Aritonang	Sekolah Pascasarjana IPB		
84	Godlief Joseph, Ir	Sekolah Pascasarjana IPB	Duta Kencana I Jalan Kencana Jingga No. 6 Curug Mekar-Bogor	0251-7542745
85	Indyah	Sekolah Pascasarjana IPB		
86	Iwan Berri Prima	BEM FKH IPB	Jalang Bateng No. 8 Dramaga	081310190820
87	Jasmal A. Syaḡsu	Sekolah Pascasarjana IPB	Jalan Gunung Batu 12A	081342654542
88	Jenal Abidin	BEM KM IPB	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Jalan Rasamala Kampus IPB Darmaga	0251-420929
89	Kaka Enindhita Prakasa	BEM FAHUTAN IPB		08568218424
90	Marhamah	Sekolah Pascasarjana IPB		
91	Meisji Liana Sari	Sekolah Pascasarjana IPB	Puri Hapsara 2D, Darmaga	0817107276
92	Nina Afriantina	MMA IPB		
93	Novel Reonald	MMA IPB		

94	Nur Sjafani	Sekolah Pascasarjana IPB	Puri Hapsara 2D, Darmaga	081315249723
95	Riana Safa'at	BEM FMIPA IPB	Student Center FMIPA	0251-621638
96	Venda Jolanda Pical, Ir., Msi	Sekolah Pascasarjana IPB	Perum Duta Kencana I Jalan Kencana Jingga No. 6	
97	Zulhaida Lubis	Sekolah Pascasarjana IPB		
98	Ramzi	Forum Wacana IPB	Jalan Kecipir No. 37C Komplek Alam Sinar sari Cibereum Bogor	081310372223
99	Halim Akbar	Forum Wacana IPB	Jalan Anyelir D-32 Komplek Alam Sinar Sari Cibereum Bogor	081310975490
100	Guruh Wisnu W	BEM KM IPB	Sekretariat BEM KM IPB	085218877113
101	Lisma Safitri	BEM KM IPB	Sekretariat BEM KM IPB	081932298197
102	Maidaswar	Forum Wacana IPB	Jalan Kelapa Dua 8 Kemang Bogor	08129664712
103	Saefudin, SP., M.Si	MMA IPB	MMA	081315394270
104	Deti Nopianti L	MMA IPB	MMA	081321255120
105	Pera Nurfathiyah	Forum Wacana IPB	Jalan Raya Badoneng No. 159A Pondok Aleysha Darmaga Bogor	085217524258
106	Ridwan Lasabunda	Forum Wacana IPB	PS Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut SPs IPB	081523630410

SEMINAR SEHARI
 "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah"
 Bogor, 23 Desember 2005

No.	Nama Lengkap (untuk sertifikat)	Instansi	Keterangan
107	Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc	Wakil Rektor IV IPB	Pemrasaran/Pengarah
108	Dr. Ir. Hardinsyah, MS	Direktur Kerjasama IPB	Ketua Panitia
109	Dr. Ir. Asnath M. Fuah	Kasubdit Perintisan Kerjasama IPB	Wakil Ketua Panitia
110	Dr. Ir. Muhammad Said Didu	Sekretaris Kementerian Negara BUMN	Pemrasaran
111	Ir. Dedi Aditya Sumanagara	Direktur Utama PT. Antam, Tbk	Pemrasaran
112	Drs. Rahmat Surjana	Kabag. Perekonomian, Setda Kab. Bogor	Pemrasaran
113	Teguh Rihananto	Sekretaris Komisi B, DPRD Kota Bogor	Pemrasaran
114	Prof. Dr. Syafri Mangkuprawira	Ketua Senat Akademik IPB	Moderator
115	Dr. Arief Daryanto, M.Ec	Direktur MMA IPB	Moderator
116	Ir. Syahrir Ika, MM	Direktur SDM dan Umum PT. Antam, Tbk	Peserta
117	Ibrahim S.,SH	Senior Comdev PT. Antam, Tbk	Peserta
118	Deasy	Staf SDM dan Umum PT. Antam, Tbk	Peserta
119	Farchaini Budi Astuti, SP	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Sekretaris Panitia
120	Farhah Faridah, SE,MM	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
121	Moelia Soegimeriyah, SS	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
122	Hartanti Anityoningrum, S.Pi	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
123	Sonya Dwi Rachmawati, S.Hut	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
124	Ratno	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
125	Ridwan,SE	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia
126	Yuniarti NH., SS, M.Hum	Staf Direktorat Kerjasama IPB	Panitia

127	Jumiko	Staf Protokoler IPB	Panitia
128	Kuwat Santoso, S.Sos	Staf Protokoler IPB	Panitia
129	Waladan	Staf Prohumasi IPB	Panitia
130	Cecep	Staf Prohumasi IPB	Panitia
131	Vita	Mahasiswa IPB	Panitia
132	Kiki	Mahasiswa IPB	Panitia

